

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah yang terus berlanjut dalam kehidupan. Masalah kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks, oleh karena itu negara tidak dapat mengatasi kemiskinan sendirian. Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan uang yang cukup di tempat kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah rendahnya taraf hidup yang disebabkan oleh kekurangan materi suatu kelompok atau sekelompok orang dibandingkan dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Situasi dimana individu atau rumah tangga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut tidak serta merta disebabkan oleh kemalasan dalam bekerja, tetapi keadaan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial ekonomi. Masalah kemiskinan yang belum terpecahkan di berbagai daerah, peneliti memutuskan untuk mengkaji kemiskinan kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom di Provinsi Banten. Pembentukan daerah kotamadya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, pemekaran tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan, pembangunan dan pelayanan sosial, serta dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi daerah. Kabupaten Tangerang Selatan terdiri dari tujuh kecamatan di Tangerang Selatan, yaitu Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren dan Setu. Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan tetap yang tertinggi di Banten. Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan tentu tinggi dan terus bertambah meskipun pertumbuhan penduduknya pesat.

**Tabel 1.1**

**Data Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)**

Tahun	Persen	Jiwa
2018	1,08%	24,06
2019	1,68 %	25,14
2020	2,34%	40,99
2021	2,57%	44,57
2022	2,50%	44,29

Sumber : Data BPS Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan 2022

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kemiskinan yang terjadi di Tangerang Selatan naik dari tahun sebelumnya, pemerintah perlu berupaya keras dalam mengetaskan kemiskinan secara signifikan dan insentif dengan bersinergi bersama masyarakat. Pada dasarnya kemiskinan merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Program pemberdayaan terhadap masyarakat miskin merupakan suatu kewajiban pemerintah dan organisasi non pemerintah. Aktivitas dimana orang-orang yang tidak berdaya atau mempunyai kehidupan yang layak, sama dengan manusia lainnya, yang artinya cukup tersedianya keperluan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, Kesehatan, keadilan, dan rasa aman. Pemerintah telah berupaya keras dalam menanggulangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah sendiri telah memiliki program-program yang di buat khusus untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti diatur dalam

Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa :

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”<sup>1</sup> Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun di daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Dengan demikian pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan program terbaru untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH).

Kelompok Usaha Bersama yang sebelumnya disebut KUBE sendiri adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program e-Warung ini merupakan program dimana masyarakatlah yang menjalankan program tersebut sebagai pelaku sistem keuangan inklusif yang disalurkan melalui sistem non tunai. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya

---

<sup>1</sup>Kementerian Sosial. “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. “Diakses pada 1 Agustus 2022 dari <http://www.kemsos.go.id/unduh/UU-Kesos-No11-2009.pdf>

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial dan subsidi.

Dengan demikian Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) sendiri merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat PKH dan keluarga kurang mampu yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan program pemberdayaan. Program e-Warong merupakan sarana yang didirikan dan dikelola secara gotong royong oleh Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) yang memanfaatkan teknologi jaringan internet untuk tempat menjual bahan pangan pokok dengan sistem transaksi non tunai. Program e-Warong dikelola langsung oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial itu sendiri. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial, ketepatan kelompok sasaran, memperluas cakupan pelayanan keuangan yang inklusif serta memperoleh dalam pengawasannya.

Program e-Warong ini termasuk kedalam program bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan.

Tujuan dari program e-Warong ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial. Serta diharapkan juga terciptanya transparansi dan

akuntabilitas untuk untuk mengarungi penyimpangan, dan ekonomi masyarakat yang menjalankan program e-Warong tersebut dapat meningkat dikarenakan masyarakat sebagai pelaku dari program tersebut. Dalam implementasinya program e-Warong di Indonesia memiliki berbagai macam pandangan baik yang dalam penerapannya berhasil maupun adanya kendala.

Dalam pembentukan e-Warong diawali dengan penentuan lokasi terlebih dahulu (desa, kecamatan pada setiap kabupaten). Setelah lokasi terpilih lalu dilakukan validasi terhadap penerima manfaat Bantuan Sosial yang produktif untuk dijadikan pengurus e-Warong dari KUBE Jasa, setelah itu dilakukan bimbingan teknis kepada yang tervalidasi untuk menetapkan kepengurusan. Tempat untuk mendirikan e-Warong harus bertempat di rumah salah satu pengurus atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota. Kesiadaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong paling singkat 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan serta tidak menuntut biaya sewa atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong.

**Tabel 1.2**

**Data e-Warong di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan**

NO	Nama e-Warong	Status	Keterangan	Tahun berdiri
1.	Usaha Bersama (Kelurahan Rempoa)	Tidak aktif (07-11-2018)	Tidak adanya anggota yang mengelola e-Warong	2017
2.	E-warong Anugrah (Kelurahan Pondok Ranji)	Aktif	Saldo beberapa KPM yang tidak terisi	2017
3.	E-warong Berkah (Kelurahan Rengas)	Tidak Aktif	Tidak tersedianya BPNT, kurangnya anggota	2017

			pengelola e-Warong	
--	--	--	--------------------	--

Sumber : Data Kecamatan Ciputat Timur

Sesuai dengan fokus tempat penelitian, yaitu di Kelurahan Pondok Ranji, program e-Warong yang ada di Pondok Ranji ini sudah berjalan dengan sebagai mana fungsi dan tujuan program ini. Dari beberapa kelurahan di Ciputat Timur hanya e-Warong yang berada di Kelurahan Pondok Ranji tersebut yang masih aktif yaitu e-Warong Anugerah daro satu unit e-Warong yang ada di Pondok Ranji, akan melayani 334 penerima manfaat, yang terdiri dari KPM PKH. Program e-Warong yang ada di Pondok Ranji ini, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, memperoleh modal usaha, meningkatkan kesejahteraan KPM PKH dan adanya kemampuan untuk mengaskses lembaga keuangan sesuai kebutuhan usaha secara berkelanjutan.

Namun pada enam tahun perjalanannya hingga saat ini khususnya di wilayah Tangerang Selatan, Program e-Warong ini tidak lepas dari berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program e-Warong yaitu kurangnya validasi data yang tepat antara jumlah bantuan sosial dengan jumlah penerima manfaat program ini, tidak terisinya saldo KPM untuk mencaikan bantuan sosial non tunai, kurang maksimalnya program e-Warong yang ada di Pondok Ranji, kurangnya jiwa wirausahawan KPM, dan kurangnya pemahaman KPM tentang program e-Warong. Program e-Warong yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan, akan tetapi masih banyaknya permasalahan yang terdapat di program e-Warong, yang bisa berdampak buruk bagi KUBE PKH.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian bermaksud untuk mengadakan penelitian guna mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi KPM PKH melalui program e-Warong yang ada di Kelurahan Pondok Ranji. Salah satunya dalam hal ini dapat membantu KPM PKH yang ada di Kelurahan Pondok Ranji untuk meningkatkan kesejahteraannya dan meningkatkan perekonomian KPM PKH melalui program e-Warong. Oleh karena itu maka

peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait **“Pelaksanaan Program e-Warong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Ranji”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya validasi data yang tepat antara jumlah bantuan sosial dengan jumlah penerima manfaat atau bantuan sosial tersebut.
2. Tidak terisinya saldo KPM untuk mencairkan bantuan sosial non tunai.
3. Kurangnya jiwa wirausahawan KPM, dan pemahaman KPM yang kurang tentang program e-Warong.
4. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pada penerima manfaat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam identifikasi masalah yang luas di atas, maka penelitian membatasi pada penelitian terkait bagaimana proses pelaksanaan program e-Warong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM PKH di Kelurahan Pondok Ranji.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan program e-Warong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Pondok Ranji?
2. Bagaimana gambaran kesejahteraan KPM melalui program e-Warong tersebut?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang proses pelaksanaan program e-Warong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Pondok Ranji.
2. Untuk mendeskripsikan keberhasilan e-Warong Anugrah dalam meningkatkan kesejahteraan KPM PKH di Kelurahan Pondok Ranji.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kesejahteraan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami tentang bagaimana mewujudkan jiwa keiwausahaan dan meningkatkan kesejahteraan meningkatkan KPM PKH melalui e-Warong.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun kedalam Lima Bab. Dimana setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab tersendiri. Agar pembaca dapat memahami uraian selanjutnya, maka Peneliti mensistematiskan pembahasan yang akan ditulis kedalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian yang diambil.



BAB II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berfikir, memuat : tentang landasan teori diantaranya tentang Implementasi Program, Kesejahteraan Keluarga dan menjelaskan kerangka berfikir dari peneliti.

BAB III. Metodologi Penelitian, memuat : tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pemilihan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV. Hasil Penelitian, memuat : gambaran lokasi penelitian dan hasil penelitian.

BAB V. Pembahasan, memuat : pembahasan dan analisa pelaksanaan program e-Warong di Kelurahan Pondok Ranji.

BAB VI. Kesimpulan dan saran, memuat : kesimpulan dan saran dari peneliti.